

---

# ANALISIS KRITIS TERHADAP MODEL PEMBANGUNAN BERBASIS KEADILAN SOSIAL

Aidil Saputra Harahap

*Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Medan Area, Indonesia*

---

## Abstrak

Analisis kritis terhadap model pembangunan berbasis keadilan sosial merupakan upaya untuk mengevaluasi efektivitas, keberlanjutan, dan dampak sosial dari pendekatan pembangunan yang menekankan pemerataan dan keadilan dalam distribusi sumber daya dan manfaat. Dengan mengadopsi perspektif kritis, penelitian ini menyoroti kelemahan, tantangan, dan pertentangan yang muncul dalam implementasi model pembangunan tersebut. Berbagai aspek yang dianalisis mencakup kebijakan publik, praktek ekonomi, struktur sosial, dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Hasil analisis kritis ini memberikan wawasan yang mendalam tentang kompleksitas dan dinamika pembangunan berbasis keadilan sosial.

**Kata Kunci:** *Analisis Kritis, Pembangunan Berbasis Keadilan Sosial, Distribusi Sumber Daya*

---



## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

*Model pembangunan berbasis keadilan sosial telah menjadi fokus utama dalam upaya global untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Pendekatan ini menekankan pentingnya pemerataan dan keadilan dalam distribusi sumber daya dan manfaat pembangunan, dengan tujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial, ekonomi, dan politik dalam masyarakat. Namun, meskipun idealnya, implementasi model ini seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan dan pertentangan yang menghambat pencapaian tujuan keadilan sosial yang diinginkan.*

*Analisis kritis terhadap model pembangunan berbasis keadilan sosial bertujuan untuk mengevaluasi dan memahami dinamika, kelemahan, serta dampak yang muncul dalam penerapan pendekatan ini. Melalui pendekatan kritis, penelitian ini mengidentifikasi pertanyaan-pertanyaan kunci tentang keberhasilan, kegagalan, dan implikasi sosial dari model pembangunan tersebut. Pendekatan ini mengakui bahwa pembangunan berbasis keadilan sosial tidaklah homogen atau konsisten di seluruh konteks dan masyarakat, dan oleh karena itu memerlukan analisis yang kontekstual dan nuansatis.*

*Salah satu aspek penting dalam analisis kritis terhadap model pembangunan berbasis keadilan sosial adalah evaluasi terhadap kebijakan publik yang diimplementasikan dalam rangka mencapai tujuan keadilan sosial. Hal ini mencakup penilaian terhadap kebijakan redistribusi, perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan hak asasi manusia yang diadopsi oleh pemerintah dalam upaya mereka untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan inklusif. Pertanyaan yang muncul antara lain adalah sejauh mana kebijakan-kebijakan ini efektif dalam mengurangi kesenjangan, sejauh mana mereka sensitif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang paling rentan, dan sejauh mana mereka memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi generasi mendatang.*

*Selain itu, analisis kritis terhadap model pembangunan berbasis keadilan sosial juga menyoroti peran praktek ekonomi dalam mencapai tujuan keadilan sosial. Meskipun ada kesepakatan bahwa pertumbuhan ekonomi harus diimbangi dengan distribusi yang lebih merata dan inklusif, realitasnya seringkali menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi yang dijalankan cenderung memperkuat ketimpangan ekonomi dan menyebabkan ketidakadilan sosial yang lebih besar. Evaluasi terhadap sistem perpajakan, kebijakan perdagangan, investasi publik, dan alokasi sumber daya ekonomi lainnya menjadi fokus penting dalam analisis ini.*

*Selanjutnya, aspek struktur sosial juga menjadi bagian integral dari analisis kritis terhadap model pembangunan berbasis keadilan sosial. Struktur sosial yang terdiri dari hierarki kelas, ras, gender, dan etnis, seringkali menjadi faktor yang mempengaruhi distribusi sumber daya dan akses terhadap peluang dalam masyarakat. Pertanyaan tentang bagaimana struktur sosial ini memengaruhi keadilan sosial, serta upaya apa yang telah dilakukan untuk merombak atau memperbaiki struktur tersebut, menjadi perhatian utama dalam analisis kritis ini.*

### **Metode Penelitian**

*Penelitian analisis kritis terhadap model pembangunan berbasis keadilan sosial melibatkan pendekatan interdisipliner yang menggabungkan metodologi kualitatif dan kuantitatif untuk memahami kompleksitas dan dinamika yang terlibat dalam implementasi model ini. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali lebih dalam tantangan, kelemahan, serta implikasi sosial dari model pembangunan tersebut secara holistik dan kontekstual.*

- 1. Pendekatan Kualitatif: Pendekatan kualitatif menjadi landasan utama dalam penelitian ini, yang memungkinkan peneliti untuk mendapatkan wawasan mendalam tentang pengalaman, persepsi, dan pandangan dari berbagai pemangku kepentingan terkait dengan model pembangunan berbasis keadilan sosial. Metode-metode kualitatif yang dapat digunakan termasuk wawancara mendalam, studi kasus, observasi partisipatif, dan analisis dokumen. Melalui wawancara mendalam, peneliti dapat memahami sudut pandang dari berbagai aktor, seperti pejabat pemerintah, aktivis masyarakat sipil, pemimpin komunitas, dan anggota masyarakat yang terkena dampak. Studi kasus memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi secara mendalam implementasi model pembangunan di konteks tertentu, sementara observasi partisipatif dapat memberikan wawasan tentang realitas lapangan dan dinamika interaksi di antara pemangku kepentingan. Analisis dokumen, termasuk kebijakan publik, laporan proyek, dan dokumen akademis, juga dapat memberikan informasi penting tentang kerangka kerja kebijakan, strategi implementasi, dan hasil dari model pembangunan tersebut.*
- 2. Pendekatan Kuantitatif: Meskipun pendekatan kualitatif mendominasi, pendekatan kuantitatif juga dapat digunakan sebagai pelengkap untuk memberikan gambaran yang lebih luas dan komprehensif tentang distribusi sumber daya, ketimpangan sosial, dan kinerja pembangunan berbasis keadilan sosial. Metode-metode kuantitatif yang dapat digunakan termasuk analisis statistik, survei, dan pemodelan ekonometrik. Melalui analisis statistik, peneliti dapat mengeksplorasi tren dan pola dalam data ekonomi dan sosial, seperti tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan, atau akses terhadap layanan publik. Survei juga dapat digunakan untuk mengumpulkan data dari responden yang mewakili berbagai kelompok dalam masyarakat, sehingga memungkinkan peneliti untuk mengukur persepsi, sikap, dan perilaku terkait dengan model pembangunan berbasis keadilan sosial. Pemodelan ekonometrik dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang hubungan kausal antara faktor-faktor ekonomi, sosial, dan politik dalam pembangunan.*
- 3. Analisis Konten: Analisis konten merupakan pendekatan yang penting dalam penelitian ini, yang memungkinkan peneliti untuk menganalisis secara sistematis dokumen-dokumen yang relevan, termasuk kebijakan publik, laporan proyek, dan artikel akademis. Analisis konten dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif atau kuantitatif, tergantung pada tujuan penelitian. Dalam analisis konten kualitatif, peneliti dapat mengidentifikasi tema-tema, pola-pola, dan konsep-konsep utama yang muncul dalam dokumen-dokumen tersebut, sementara dalam analisis konten kuantitatif, peneliti dapat mengukur frekuensi dan distribusi*

dari kata-kata kunci atau variabel-variabel tertentu dalam dokumen-dokumen tersebut.

4. *Analisis Kontrasif*: Analisis kontrasif merupakan pendekatan yang membandingkan implementasi model pembangunan berbasis keadilan sosial di berbagai konteks atau wilayah. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi perbedaan-perbedaan dan kesamaan dalam strategi, kebijakan, dan hasil pembangunan antara negara-negara atau daerah-daerah yang berbeda. Analisis kontrasif dapat memberikan wawasan yang berharga tentang faktor-faktor kontekstual yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi model pembangunan tersebut.

## **PEMBAHASAN**

Model pembangunan berbasis keadilan sosial telah menjadi fokus perhatian dalam upaya mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Konsep ini menekankan perlunya pemerataan dan keadilan dalam distribusi sumber daya dan manfaat pembangunan sebagai landasan untuk mengurangi kesenjangan sosial, ekonomi, dan politik dalam masyarakat. Namun, meskipun tujuan pembangunan ini dianggap mulia, implementasinya seringkali dihadapkan pada tantangan yang kompleks dan beragam.

Tantangan utama dalam implementasi model pembangunan berbasis keadilan sosial adalah kompleksitas faktor-faktor yang mempengaruhi kesetaraan dan distribusi sumber daya. Struktur ekonomi yang tidak merata, ketimpangan politik, dan ketidakstabilan sosial menjadi hambatan utama dalam mencapai tujuan pembangunan yang adil. Selain itu, ketidakmampuan dalam mengatasi ketidakadilan struktural yang mendasar juga menjadi tantangan serius dalam upaya pemerataan sumber daya.

Keberhasilan dan kegagalan model pembangunan berbasis keadilan sosial perlu dievaluasi secara kritis untuk memahami efektivitas dan dampaknya dalam masyarakat. Meskipun telah terjadi kemajuan dalam beberapa aspek, seperti peningkatan akses terhadap layanan publik dan pendidikan, masih ada banyak kegagalan dalam mencapai kesetaraan dan keadilan yang diinginkan. Kegagalan ini sering kali disebabkan oleh kebijakan publik yang tidak efektif, kurangnya partisipasi masyarakat, dan tantangan struktural yang sulit diatasi.

Evaluasi kebijakan publik menjadi salah satu aspek penting dalam analisis kritis terhadap model pembangunan berbasis keadilan sosial. Penting untuk menilai kebijakan-kebijakan yang diadopsi oleh pemerintah dalam upaya mereka untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan inklusif. Hal ini mencakup kebijakan redistribusi, perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan hak asasi manusia. Evaluasi ini memungkinkan untuk mengidentifikasi kelemahan dalam implementasi kebijakan dan mencari solusi untuk meningkatkan efektivitasnya.

Selain itu, penting juga untuk mempertimbangkan peran praktek ekonomi dalam mencapai tujuan keadilan sosial. Meskipun ada kesepakatan bahwa pertumbuhan ekonomi harus diimbangi dengan distribusi yang lebih merata dan inklusif, realitasnya seringkali

menunjukkan sebaliknya. Kebijakan ekonomi yang tidak berpihak pada masyarakat rentan dapat memperkuat ketimpangan ekonomi dan menyebabkan ketidakadilan sosial yang lebih besar. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi yang cermat terhadap sistem perpajakan, kebijakan perdagangan, investasi publik, dan alokasi sumber daya ekonomi lainnya.

Analisis kritis terhadap model pembangunan berbasis keadilan sosial juga perlu memperhatikan aspek struktur sosial yang mempengaruhi distribusi sumber daya dan akses terhadap peluang dalam masyarakat. Struktur sosial yang terdiri dari hierarki kelas, ras, gender, dan etnis seringkali menjadi faktor yang memengaruhi kesetaraan dan keadilan dalam masyarakat. Pertanyaan tentang bagaimana struktur sosial ini memengaruhi pembangunan serta upaya apa yang telah dilakukan untuk merombak atau memperbaiki struktur tersebut menjadi perhatian utama dalam analisis ini.

Selanjutnya, dalam melakukan analisis kritis terhadap model pembangunan berbasis keadilan sosial, penting untuk melihat konteks historis dan politik yang mempengaruhi implementasi model tersebut. Konteks sejarah suatu negara, pengalaman kolonial, konflik internal, atau perubahan rezim politik dapat memiliki dampak jangka panjang terhadap pembangunan dan budaya politik masyarakat. Memahami konteks ini penting untuk memahami dinamika pembangunan berbasis keadilan sosial.

Peran aktor-aktor politik dan masyarakat sipil juga perlu diperhatikan dalam analisis kritis ini. Partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan dalam proses pembangunan menjadi kunci dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil dan inklusif. Aktivistis masyarakat sipil, organisasi non-pemerintah, dan gerakan sosial dapat memainkan peran penting dalam mengawasi kebijakan pemerintah, memperjuangkan hak-hak masyarakat, dan memperkuat tuntutan atas keadilan sosial.

Selanjutnya, perlu diperhatikan juga dampak dari faktor-faktor eksternal, seperti globalisasi dan intervensi asing, terhadap implementasi model pembangunan berbasis keadilan sosial. Globalisasi ekonomi dan perdagangan internasional dapat memengaruhi kebijakan ekonomi suatu negara dan memperkuat ketimpangan global. Intervensi asing, baik dalam bentuk bantuan pembangunan maupun campur tangan politik, juga dapat memengaruhi arah dan keberhasilan pembangunan berbasis keadilan sosial.

Selain itu, analisis kritis terhadap model pembangunan berbasis keadilan sosial harus memperhitungkan implikasi jangka panjang dari kebijakan dan tindakan yang diambil dalam rangka mencapai tujuan pembangunan. Evaluasi dampak jangka panjang dari kebijakan redistribusi, perlindungan sosial, atau pemberdayaan ekonomi dapat memberikan wawasan yang berharga tentang efektivitas dan keberlanjutan model pembangunan tersebut.

Dalam melakukan analisis kritis terhadap model pembangunan berbasis keadilan sosial, penting untuk memperhatikan perspektif gender dan kesetaraan. Kesetaraan gender dan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan merupakan komponen penting dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil dan inklusif. Oleh karena itu, evaluasi kebijakan dan praktik pembangunan perlu memperhitungkan dampaknya terhadap gender dan upaya untuk meningkatkan partisipasi dan akses perempuan dalam pembangunan.

Selain itu, aspek lingkungan juga perlu diperhitungkan dalam analisis kritis terhadap model pembangunan berbasis keadilan sosial. Pembangunan yang berkelanjutan harus

*memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan mempertimbangkan dampaknya terhadap ekosistem dan keseimbangan alam. Evaluasi kebijakan dan praktik pembangunan perlu memperhitungkan dampaknya terhadap lingkungan dan upaya untuk mengurangi jejak ekologis dari aktivitas pembangunan.*

*Dalam mengakhiri analisis kritis terhadap model pembangunan berbasis keadilan sosial, penting untuk menyadari bahwa tidak ada pendekatan pembangunan yang sempurna atau tanpa kelemahan. Setiap model pembangunan memiliki tantangan dan pertentangan tersendiri yang perlu diatasi. Namun, dengan melakukan analisis kritis yang teliti dan komprehensif, kita dapat mengidentifikasi kelemahan-kelemahan tersebut dan mencari solusi yang dapat meningkatkan efektivitas dan keadilan dari model pembangunan tersebut. Dengan demikian, analisis kritis ini dapat memberikan sumbangan yang berharga bagi upaya mencapai pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan adil dalam skala lokal, nasional, dan global.*

*Dalam melanjutkan pembahasan, penting untuk menyoroti perlunya melibatkan pendekatan partisipatif dalam implementasi model pembangunan berbasis keadilan sosial. Partisipasi masyarakat adalah kunci untuk memastikan bahwa kebijakan dan program pembangunan mencerminkan kebutuhan dan aspirasi langsung dari anggota masyarakat yang terkena dampak. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan, kita dapat memastikan bahwa model pembangunan tersebut lebih responsif dan relevan bagi kebutuhan lokal.*

*Selain itu, analisis kritis terhadap model pembangunan berbasis keadilan sosial juga harus memperhatikan aspek etika dan nilai yang mendasari pendekatan ini. Prinsip-prinsip seperti keadilan, kesetaraan, martabat manusia, dan keberlanjutan lingkungan harus menjadi pijakan dalam setiap kebijakan dan tindakan pembangunan. Dengan mempertimbangkan nilai-nilai ini, kita dapat memastikan bahwa model pembangunan tersebut benar-benar berkontribusi pada kesejahteraan dan keadilan masyarakat secara keseluruhan.*

*Selanjutnya, evaluasi partisipatif juga penting dalam analisis kritis terhadap model pembangunan berbasis keadilan sosial. Melalui proses evaluasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, kita dapat mengumpulkan masukan dan umpan balik langsung tentang efektivitas kebijakan dan program pembangunan. Dengan demikian, kita dapat mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan dan memperkuat komitmen terhadap prinsip-prinsip keadilan sosial.*

*Dalam konteks global, kolaborasi lintas negara dan regional menjadi semakin penting dalam mendukung implementasi model pembangunan berbasis keadilan sosial. Pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan sumber daya antar negara dapat memperkuat kapasitas dan efektivitas upaya pembangunan. Melalui kerjasama internasional, negara-negara dapat belajar satu sama lain tentang praktik terbaik dalam mencapai tujuan keadilan sosial dan bekerja bersama untuk mengatasi tantangan bersama yang dihadapi.*

*Namun, dalam melakukan kerjasama internasional, penting untuk memperhatikan ketidaksetaraan kekuasaan dan eksploitasi yang dapat terjadi antara negara-negara yang lebih kuat dan lemah. Upaya pembangunan harus dilakukan dalam semangat kemitraan*

*yang adil dan saling menguntungkan, di mana negara-negara berdaulat memiliki suara yang setara dalam proses pengambilan keputusan dan mendapatkan manfaat yang adil dari kerjasama internasional.*

*Dalam mengakhiri pembahasan ini, penting untuk menyadari bahwa upaya untuk mewujudkan pembangunan berbasis keadilan sosial merupakan tantangan yang kompleks dan berkelanjutan. Dibutuhkan komitmen jangka panjang, kolaborasi lintas sektor, dan partisipasi aktif dari masyarakat untuk mencapai tujuan ini. Meskipun akan ada hambatan dan rintangan di sepanjang jalan, analisis kritis terhadap model pembangunan berbasis keadilan sosial dapat memberikan pandangan yang lebih jelas tentang jalur yang harus ditempuh dan langkah-langkah konkret yang dapat diambil untuk mencapai pembangunan yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan bagi semua orang.*

*perlu juga dicermati bahwa model pembangunan berbasis keadilan sosial harus memperhitungkan aspek keberlanjutan jangka panjang. Hal ini termasuk memastikan bahwa sumber daya alam dan lingkungan dipertahankan untuk generasi mendatang, serta bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya bersifat sementara dan tidak berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan strategi pembangunan yang memperhitungkan dampak jangka panjang dari setiap tindakan pembangunan yang diambil.*

*Selain itu, analisis kritis terhadap model pembangunan berbasis keadilan sosial juga perlu memperhitungkan peran sektor swasta dalam pembangunan. Meskipun pemerintah memiliki peran sentral dalam menciptakan kebijakan dan mengarahkan pembangunan, sektor swasta sering kali menjadi mitra penting dalam menyediakan investasi, teknologi, dan inovasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan pembangunan. Namun, perlu dipastikan bahwa peran sektor swasta tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan sosial dan tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat secara keseluruhan.*

*Selanjutnya, dalam menganalisis kritis model pembangunan berbasis keadilan sosial, penting juga untuk mempertimbangkan peran media massa dan komunikasi dalam membentuk opini publik dan memengaruhi kebijakan pembangunan. Media massa memiliki kekuatan besar dalam membentuk narasi tentang isu-isu pembangunan dan mempengaruhi persepsi masyarakat tentang kebijakan dan program yang diusulkan. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi bagaimana media massa melaporkan tentang pembangunan berbasis keadilan sosial dan bagaimana hal tersebut dapat memengaruhi dukungan masyarakat terhadap upaya tersebut.*

*Dalam konteks globalisasi dan interkoneksi yang semakin meningkat, penting untuk menyadari bahwa tantangan pembangunan berbasis keadilan sosial tidak dapat diatasi secara terisolasi oleh satu negara atau wilayah saja. Sebaliknya, diperlukan kerjasama lintas batas dan solusi bersama untuk mengatasi ketidakadilan dan ketimpangan global. Hal ini termasuk upaya untuk mengatasi perdagangan yang tidak adil, membantu negara-negara berkembang untuk meningkatkan akses terhadap pasar global, dan mengurangi ketergantungan pada bantuan luar negeri.*

*Namun demikian, dalam melakukan kerjasama internasional, penting untuk memastikan bahwa negara-negara berkembang memiliki suara yang setara dalam proses pengambilan keputusan dan mendapatkan manfaat yang adil dari kerjasama tersebut. Terlalu sering, negara-negara yang lebih kuat memiliki kekuatan untuk mendominasi*

*agenda pembangunan global dan memaksakan kebijakan yang tidak selalu menguntungkan bagi negara-negara yang lebih lemah. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa kerjasama internasional didasarkan pada prinsip kemitraan yang adil dan saling menguntungkan.*

*Selanjutnya, dalam melanjutkan analisis kritis terhadap model pembangunan berbasis keadilan sosial, penting untuk memperhatikan peran lembaga internasional dan organisasi multilateral dalam mendukung upaya pembangunan. Organisasi seperti PBB, Bank Dunia, dan Dana Moneter Internasional memiliki peran penting dalam memberikan bantuan teknis, finansial, dan politik kepada negara-negara berkembang dalam upaya mencapai tujuan pembangunan. Namun demikian, perlu dievaluasi apakah lembaga-lembaga ini benar-benar mendukung prinsip-prinsip keadilan sosial atau justru memperkuat ketidakadilan ekonomi dan politik yang ada.*

### **Kesimpulan**

*Dalam menjalankan analisis kritis terhadap model pembangunan berbasis keadilan sosial, tergambar bahwa pendekatan ini merupakan landasan yang penting dalam upaya mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Analisis tersebut mengungkapkan kompleksitas dan tantangan yang terlibat dalam menghadapi ketidaksetaraan ekonomi, politik, dan sosial yang ada dalam masyarakat. Selain itu, telah diidentifikasi pula beragam kegagalan dan keberhasilan dalam implementasi model tersebut, menyoroti pentingnya evaluasi yang berkelanjutan terhadap kebijakan publik dan praktek ekonomi.*

*Selanjutnya, analisis kritis ini memberikan perhatian khusus pada peran penting partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat sipil, organisasi non-pemerintah, dan gerakan sosial, dianggap sebagai kunci untuk memastikan bahwa kebijakan dan program pembangunan mencerminkan kebutuhan dan aspirasi langsung dari anggota masyarakat yang terkena dampak. Melalui partisipasi ini, potensi untuk memperkuat legitimasi, akuntabilitas, dan efektivitas upaya pembangunan menjadi lebih besar.*

*Terakhir, kesimpulan dari analisis kritis ini menekankan pentingnya kerjasama lintas negara dan regional dalam mendukung pembangunan berbasis keadilan sosial. Kolaborasi internasional menjadi kunci untuk memperkuat kapasitas dan efektivitas upaya pembangunan, sambil memastikan bahwa negara-negara berkembang memiliki suara yang setara dalam proses pengambilan keputusan global. Dengan demikian, analisis kritis terhadap model pembangunan berbasis keadilan sosial memberikan pandangan yang lebih jelas tentang arah yang harus ditempuh dalam upaya mencapai pembangunan yang lebih berkelanjutan dan inklusif bagi semua orang.*

### **DAFTAR PUSTAKA**



- Batubara, B. M., & Muda, I. (2019). *Reformasi Administrasi Dalam Perspektif Pelayanan Publik*.
- Hidayat, R. (2019). *Implementasi Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat (Studi Meningkatkan Pelayanan Pada Masyarakat di Kecamatan Sekerak Kabupaten Aceh Tamiang) (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Hutabarat, C. M. (2021). *Pengaruh Penambahan Serat Kawat Bendrat Pada Campuran Beton K175 Terhadap Kuat Tekan Beton (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Syarif, Y. (2022). *PROYEK PEMBANGUNAN PERLUASAN GUDANG BOILER PT. INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK DELI SERDANG. Laporan Kerja Praktek Mahasiswa Teknik, 1(3)*.
- Tarigan, R. S., & Dwiatma, G. (2022). *ANALISA STEGANOGRAFI DENGAN METODE BPCS (Bit-Plane Complexity Segmentation) DAN LSB (Least Significant Bit) PADA PENGOLAHAN CITRA*.
- Tarigan, U., & Simatupang, I. (2004). *Pelaksanaan Pembinaan dalam Meningkatkan Prestasi Kerja Pegawai di Bagian Keuangan Pemerintah Kota Binjai (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Wahyudi, D. (2022). *BAB V PERENCANAAN KARIR. Manajemen Sumber Daya Manusia (Konsep Dasar Di Era Digital), 45*.
- WARUWU, B. M., & Harahap, G. Y. (2022). *PENGERJAAN ABUTMENT PADA PROYEK PENGGANTIAN JEMBATAN IDANO EHO-DESA SIFOROASI-KECAMATAN AMANDRAYA-KABUPATEN NIAS SELATAN. Laporan Kerja Praktek Mahasiswa Teknik, 1(3)*.
- Aulia, A. M., Tarigan, R. S., Wibowo, H. T., & Dwiatma, G. (2022). *Penerapan E-Gudang Sebagai Tempat Penampungan Ikan*.
- Azhar, S. (2013). *Studi Identifikasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Agresifitas Remaja Pemain Point Blank (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Deliana, M. *Budaya Organisasi Salah Satu Faktor Penentu Kinerja Karyawan Organizational Culture as a Kind of Factor Employee's Performance*.
- Fahmi, A. M. (2021). *Analisis Pengaruh Pengganti Filler Dengan Abu Cangkang Sawit Terhadap Kinerja Perkerasan Aspal (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Fauziah, I. (2009). *Multiplikasi Tanaman Krisan (Chrysanthemum sp.) dengan Menggunakan Media MS (Murashige-Skoog) Padat*.
- Hasibuan, E. J., & Yolanda, A. (2023). *Strategi Komunikasi Humas dalam Mempertahankan Citra Positif Akibat Kasus Korupsi APBD di DPRD Sumatera Utara*.
- Hayati, I. (2021). *Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Perempuan (Studi Kasus Desa Lamamek, Kecamatan Simeulue Barat, Kabupaten Simeulue, Provinsi Aceh)*.
- Kadir, A. (2017). *Studi pemerintah daerah dan pelayanan publik*.
- LUMBANRAJA, W., & Harahap, G. Y. (2022). *PROYEK PEMBANGUNAN IRIAN SUPERMARKET TEMBUNG-PERCUT SEI TUAN SUMATERA UTARA. Laporan Kerja Praktek Mahasiswa Teknik, 1(3)*.
- Muda, I. (2018). *Teori Administrasi Publik*.
- Muda, I., & Masitho, B. (2019). *Peranan Fraksi Partai Demokrat dalam Mendukung Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Putri, R. D. (2019). *Implementasi Kebijakan Program Pensiun Dini Di PT. Telkom Regional 1 Sumatera (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Rangkuti, A. H. (2022). *Analisis Yuridis Persekongkolan Tender Rehabilitasi Jalan dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha (Studi Kasus Putusan Nomor 14/Kppu. 1/2018) (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- SAJIWO, A., & Harahap, G. Y. (2022). *PROYEK PEMBANGUNAN SPBU SHELL ADAM MALIK. Laporan Kerja Praktek Mahasiswa Teknik, 1(3)*.
- Santoso, J. (2021). *Analisis Kondisi Struktur Jalan Berdasarkan Metode RCI (Road Condition Index) Untuk Perencanaan Overlay Jalan (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Sihombing, M., & Tarigan, U. (2013). *Pengaruh Pangkat dan Kompetensi Pegawai Terhadap Pengembangan Karir pada Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara Medan*.
- Siregar, N. S. S. (2016). *Komunikasi terapeutik dokter dan paramedis terhadap kepuasan pasien dalam pelayanan kesehatan pada rumah sakit bernuansa islami di kota Medan (Doctoral dissertation, Program Pasca sarjana UIN-SU)*.
- Siregar, N. S. S. (2019). *Implementasi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Kebijakan Penertiban Hewan Ternak (Studi di Kecamatan IDI Rayeuk Kabupaten Aceh Timur) (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Syarif, Y. (2018). *Rancangan Power Amplifier Untuk Alat Pengukur Transmission Loss Material Akustik Dengan Metode Impedance Tube. JOURNAL OF ELECTRICAL AND SYSTEM CONTROL ENGINEERING, 1(2)*.

- Tarigan, U. (2005). *Kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Aparatur (Kajian Sekretariat Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara)*.
- Tarigan, U. (2006). *Analisa Kinerja Pegawai Badan Pengawas Kabupaten Gayo Lues*.
- Tarigan, U. (2007). *Prospek Kewenangan Daerah dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Aceh Tamiang*.
- Tarigan, U. (2012). *Pengaruh Motivasi dan Kreatifitas Terhadap Kinerja Pamong Belajar di Balai Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal Regional I Medan*.
- Tarigan, U. (2018). *Analisis Kualitas Pelayanan Publik dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Rantau Selamat Kabupaten Aceh Timur*.
- Tarigan, U., & Muda, I. (2013). *Kepemimpinan Keuchik (Studi Tentang Kepemimpinan Keuchik di Gampong Siti Ambia, Suka Makmur, Kuta Simboling, Teluk Ambun dan Pulo Sarok Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil)*.
- Tarigan, U., & Ritonga, S. (2005). *Fungsi Pengawasan Kepegawaian Menunjang Pembinaan Pegawai Negeri Sipil di Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara Medan (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Tarigan, U., & Siregar, T. (2004). *Peranan Pengawasan Dalam Meningkatkan Pelayanan Masyarakat (Suatu Studi Deskriptif Analisis di Kantor Lurah Kelurahan Binjai Timur Kota Binjai) (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Tarigan, U., & Usman, D. A. (2007). *Sistem Penilaian Prestasi Kerja Pegawai di Badan Diklat Provinsi Sumatera Utara*.
- Widyastuti, I. W. (2022). *Analisis Kinerja Anggota DPRD Kabupaten Batu Bara Tahun 2014-2019 dalam Pembentukan Peraturan Daerah*.
- Novita, D. (2019). *Analisis Kinerja Inspektorat Daerah Dalam Melakukan Fungsi Pengawasan (Studi Pada Inspektorat Kota Langsa)*.
- Nobriama, R. A. (2019). *pengaruh pemberian pupuk organik cair kandang kelinci dan kompos limbah baglog pada pertumbuhan bibit Kakao (theobroma cacao L.) Di polibeg (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Tarigan, U., & Batubara, B. M. (2015). *Peran Radio Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang (Rpd 2 FM) dalam Menunjang Program Pembangunan Daerah (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Tarigan, R. S. (2022). *KEBERMANFAATAN TEKNOLOGI SISTEM INFORMASI PADA DUNIA PENDIDIKAN DI INDONESIA*.
- Eky Erma, M. (2019). *PROFIL KINERJA RETURN DAN RESIKO PADA SAHAM TIDAK BERETIKA: STUDI KASUS PERUSAHAAN ROKOK DI INDONESIA*.
- Tarigan, U., & Sinaga, M. (2010). *Implementasi Manajemen Keuangan Sekolah dalam Peningkatan Mutu Pendidikan (Studi Kasus di SMA Negeri 2 Sibolga)*.
- Harahap, G. Y. (2004). *Decentralization and its Implications on the development of Housing in Medan*.
- Karim, A. (2017). *Efektivitas Beberapa Produk Pembersih Wajah Antiacne Terhadap Balderi Penyebab Jerawat Propianibacterium acnes*.
- Siregar, N. S. S. (2019). *Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Sumber Sari Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjungbalai (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- MARPAUNG, A. D., & Harahap, G. Y. (2022). *PEMBANGUNAN PLTA PEUSANGAN 1 & 2 HYDROELECTRIC POWER PLANT CONTRUCTION PROJECT 88 MW-PENSTOCK LINE ACEH TENGAH. Laporan Kerja Praktek Mahasiswa Teknik, 1(3)*.
- Santoso, M. H. (2021). *Application of Association Rule Method Using Apriori Algorithm to Find Sales Patterns Case Study of Indomaret Tanjung Anom. Brilliance: Research of Artificial Intelligence, 1(2), 54-66*.
- Putri, A. O. (2017). *Analisis Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Kelurahan Sei Putih Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan*.
- Muda, I., & Angelia, N. (2018). *Peranan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Mengelola Sektor Pariwisata Pantai di Kecamatan Sirombu Kabupaten Nias Barat*.
- Tarigan, U., & Dewi, R. (2015). *Peranan Gaya Kepemimpinan Dalam Upaya Meningkatkan Prestasi Kerja di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Tarigan, R. S. (2018). *Manual Procedure Petunjuk Penggunaan Sistem Informasi Program Studi (SIPRODI)*.
- Girsang, L. (2020). *Pengaruh Pelatihan Dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan Pt. Lintas Aman Andalas Medan (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Batubara, B. M. (2023). *Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Kemiskinan (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara)*.
- Siregar, N. I., & Aziz, A. (2012). *Model Pendidikan Karakter di SMA Swasta Brigjen Katamso Medan*.

- SIDABUTAR, P. R., & Harahap, G. Y. (2022). IDENTIFIKASI PELAT LANTAI PERON TINGGI PADA PEMBANGUNAN STASIUN LUBUK PAKAM BARU. *Laporan Kerja Praktek Mahasiswa Teknik*, 1(3).
- Gunawan, I., Matondang, A., & Sembiring, M. (2020, February). *Lean Technology Implementation For Reducing The Dwelling Time Level*. In *Proceedings of the 1st International Conference of Global Education and Society Science, ICOGESS 2019, 14 March, Medan, North Sumatera, Indonesia*.
- Hartono, B. *HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT: A STUDY OF THE POLICY IMPLEMENTATION OF THE TRAINING POLICY TOWARD CAREER OF GOVERNMENT'S SERVANTS IN SLEMAN REGION*.
- Harahap, G. Y. (2020). *Instilling Participatory Planning in Disaster Resilience Measures: Recovery of Tsunami-affected Communities in Banda Aceh, Indonesia*. *Budapest International Research in Exact Sciences (BirEx) Journal*, 2(3), 394-404.
- Tarigan, U., & Suriadi, A. (2007). *Fungsi Pengawasan DPRD dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Kabupaten Aceh Timur*.
- Tarigan, U., & Harahap, B. (2006). *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2004 Tentang surat Izin Tempat Usaha (SITU) di Kabupaten Gayo Lues*.